



Mengusung Politik Damai Abdurrahman Wahid dalam Mengatasi Eskalasi Konflik Kelompok Kriminal Bersenjata dengan Tentara Nasional Indonesia di Papua

Yetva Softiming Letsoin¹, Oktovianus Robertus Baunsele², Tomy Taroreh³

Abstract

This paper intends to reflect philosophically as well as to promote the need for a peaceful politics in resolving the conflict of the Armed Criminal Group (KKB) in Papua. This elaboration is reviewed based on Wahid's words and political legacy. The methodology used is the analysis of the text through critical reading that listens to the understanding and concept of peaceful politics according to the spark of Wahid's thought. The author assumes that the prolonged conflict that occurs in Papua, namely the conflict stirred up by the KKB, is one of the biggest threats to the integrity of the Republic of Indonesia. The Indonesian government's decision to upgrade the KKB's status as a terrorist group presupposes the deployment of security forces to hunt down KKB members. However, this has not been the right solution, because in fact the conflict continues to this day. Therefore, the government needs to promote appropriate and relevant solutions so that the disintegration of the nation does not occur. The author finds that humanism and Wahid's ideas about the politics of peace that adhere to the principles of equality and liberation can stem various social and political problems, especially the escalation of conflict in Papua.

Keywords

Conflict; Oppression; Politics of Peace; Liberation; Democracy

Abstrak

Tulisan ini bermaksud merefleksikan secara filosofis sekaligus mengusung perlunya politik damai dalam penyelesaian konflik Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Elaborasi ini ditinjau berdasarkan cetusan dan warisan politik Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Metodologi yang digunakan adalah analisis teks melalui pembacaan kritis yang menyimak pemahaman dan konsep politik damai menurut percikan

¹ Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang, Jawa Timur, Indonesia

² Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang, Jawa Timur, Indonesia

³ Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang, Jawa Timur, Indonesia

Corresponding Author:

Oktovianus Rebertus Baunsele, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang, Jawa Timur, Indonesia ✉ vianbaunsele@gmail.com



pemikiran Gus Dur. Penulis berasumsi bahwa konflik berkepanjangan yang terjadi di Papua, yaitu konflik yang digelorakan oleh KKB menjadi salah satu ancaman terbesar bagi keutuhan NKRI. Keputusan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan status KKB sebagai kelompok teroris mengandaikan adanya upaya penerahan aparat keamanan untuk membunuh para anggota KKB. Namun hal itu belum menjadi solusi yang tepat karena konflik terus terjadi hingga saat ini. Karena itu, pemerintah perlu menggalakkan solusi yang tepat dan relevan agar disintegrasi bangsa tidak terjadi. Penulis menemukan bahwa humanisme dan gagasan Gus Dur tentang politik damai yang mengedepankan prinsip kesetaraan dan pembebasan dapat membendung berbagai masalah sosial dan politik, terutama eskalasi konflik di Papua.

Kata Kunci

Konflik; Penindasan; Politik Damai; Pembebasan; Demokrasi

Article history

Received 10 October 2023

Revised 15 December 2023

Accepted 19 December 2023

Published 30 December 2023

Cite this article

Letsoin, Y.S., Bunsele, O.R., & Taroreh, T. (2023). Mengusung Politik Damai Abdurrahman Wahid dalam Mengatasi Eskalasi Konflik Kelompok Kriminal Bersenjata dengan Tentara Nasional Indonesia di Papua. *Jurnal Politik Profetik*, 11 (2), 169-185. <https://doi.org/10.24252/profetik.v11i2a3>

Pendahuluan

Aksi Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua kian membengis. Pada 2 Maret 2022, delapan karyawan PT Palapa Ring Timur Telematika (PPT) tewas oleh serangan KKB di Kampung Kago, Distrik Beoga, Puncak Papua. Kita masih mengingat insiden terparah, yakni aksi kekerasan terhadap 19 pegawai Istaka Karya di Kabupaten Nduga pada 1 Desember 2018 (Ramdhan, 2021) dan pembunuhan 28 pekerja proyek jalan Trans Papua tanggal 2 Desember 2018 (Suropati, 2019), dan masih banyak insiden jika terus dirunut. Kelompok yang bermula dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) ini, mendasari pergerakannya pada ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah Indonesia selama ini (Kaisupy & Maing, 2021).

Bukan hanya ketidakpuasan, para peneliti LIPI lebih jauh beranggapan bahwa konflik di Papua ditengarai beberapa permasalahan mendasar, seperti marginalisasi penduduk asli Papua, kegagalan pembangunan, pelanggaran HAM dan kekerasan militer, hingga proses integrasi Papua ke NKRI yang dianggap bermasalah (Anugerah, 2019). Hal inilah memantik konflik berkepanjangan sehingga merongrong kedamaian bangsa, dan eksistensi KKB seolah mendapat legitimasinya.

Kondisi demikian hanyalah sebagian kecil dari kompleksitas postur konflik di Papua. Ada aspek lain yang turut menyumbang sengkabut dalam konflik yang berurat-berakar hingga kini. Lantas, apakah keadaan demikian dibiarkan terjadi terus menerus? Pendekatan apa yang perlu dilakukan oleh komponen bangsa Indonesia terutama para pemangku kepentingan untuk membendung konflik? Bagaimana upaya yang tepat dalam merunut akar konflik serta merumuskan

solusi, sehingga pernyataan bahwa Papua adalah bagian integral dari Indonesia sungguh merupakan fakta konkret dan bukan sebatas wacana?

Beberapa peneliti terdahulu mengusung pelbagai pendekatan sebagai solusi untuk meredam konflik di Papua. Boy Anugerah dalam penelitiannya berjudul “Papua: Mengurai Konflik dan Merumuskan Solusi” menguraikan pentingnya penerapan otonomi khusus (Otsus) Papua secara paripurna. Namun demikian, penulis tersebut mengakui bahwa Otsus Papua suatu saat dapat menjadi kedaluwarsa. Karena itu, Anugerah mengusung pendekatan demokrasi. Menurutnya, yang dibutuhkan oleh Papua adalah pendekatan demokrasi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat yang sebanyak-banyaknya. Masyarakat yang dia maksudkan adalah masyarakat pribumi Papua, pemilik sah tanah Papua (Anugerah, 2019).

Kemudian, Delvia Ananda Kaisupy dan Skolastika Genapang Maing dalam elaborasi mereka yang berjudul “Proses Negosiasi Konflik Papua: Dialog Jakarta-Papua” mencetuskan perlunya *win-win solution* melalui pendekatan dialog (Kaisupy & Maing, 2021). Mereka memetakan secara eksplisit para pihak yang harus dilibatkan dalam dialog itu. Mereka menyimpulkan bahwa dialog Jakarta-Papua harus merujuk pada nilai-nilai budaya orang Papua dan tanpa menggunakan pendekatan militer ataupun kekerasan. Elaborasi mereka tidak merunut alasan dan pentingnya pendekatan militer dalam upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia. Diplomasi damai pernah diterapkan dalam kurun waktu tahun 1950-1960 sebagai upaya mengembalikan Papua ke pangkuan NKRI, akan tetapi hasilnya nihil, dan itulah mengapa pendekatan militer diterapkan kala itu (Mulyadi et al., 2021).

Di samping para peneliti tadi, Laksamana Muda TNI (Purn.) Untung Suropati dalam tulisannya berjudul “Solusi Komprehensif Menuju Papua Baru: Penyelesaian Konflik Papua Secara Damai, Adil dan Bermartabat” menggagaskan bahwa kompleksitas permasalahan Papua secara substansial sebenarnya hanya persoalan seputar pemahaman dan relasi konsep keindonesiaan dan kepapuaan. Menurutnya, konsep keindonesiaan perlu dibangun dengan memberi ruang yang lebih adil dan ramah bagi tumbuhnya konsep kepapuaan sehingga proses inklusi kedua pihak berkembang secara mutual (Suropati, 2019). Seperti apa gagasan cemerlang itu diimplementasikan, tidaklah dijelaskan. Menurutnya, duduk bersama atau berunding menjadi jalan satu-satunya bagi penyelesaian konflik di Papua.

Solusi yang ditawarkan dari elaborasi pada ketiga tulisan tadi dapat diringkas ke dalam tiga pendekatan, yaitu pendekatan demokrasi berupa partisipasi aktif orang Papua asli (Melanesia), pendekatan dialog, dan pendekatan yang membangun konsep kepapuaan dan keindonesiaan dalam bingkai inklusivitas kedua pihak yang berkembang secara mutual. Ketiga peneliti terdahulu berhasil menghadirkan konsep-konsep ideal dalam rangka pemecahan konflik KKB-TNI di Papua. Namun demikian, konsep-konsep itu telah sebagian diimplementasikan dan belum juga membendung eskalasi konflik di Papua, kecuali kalau konsep yang ditawarkan itu berdiri di atas suatu prinsip dan konstruksi berpikir yang dibangun untuk menjadi fondasi bagi dialog, demokrasi, dan makna kepapuaan dalam

bingkai keindonesiaan. Prinsip dasar yang dimaksud adalah konsep politik damai.

Upaya perwujudan damai di tanah Papua tampaknya perlu juga berkaca dari resolusi atas konflik minor antar-negara di ASEAN, maupun antar-negara ASEAN dengan negara-negara lain di wilayah tetangganya yang kerap terjadi. Konflik antara Vietnam dengan Kamboja, Kamboja dengan Thailand, Indonesia dengan Malaysia, termasuk konflik dalam negeri Myanmar terkait masalah Rohingya adalah beberapa konflik yang terjadi di kawasan ini. Berhadapan dengan konflik yang ada, ASEAN tidak tinggal diam, tapi menyikapi beberapa permasalahan di antara negara-negara anggotanya ini. Tercatat, ASEAN memiliki enam dokumen penting yang mengatur tentang mekanisme manajemen konflik, mulai dari Piagam ASEAN sampai Cetak Biru Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN. Salah satu dari enam dokumen itu adalah Traktat Persahabatan dan Kerjasama, sebagai mekanisme resolusi konflik (Indrawan, 2021). Intisari dari dokumen-dokumen tersebut mengusung upaya damai dengan menawarkan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai, seperti menghormati kedaulatan, kesamaan, integritas teritorial, dan identitas nasional, menolak menggunakan agresi dan penggunaan kekuatan senjata, atau aksi- aksi lainnya yang tidak sesuai dengan hukum internasional. Cetusan tersebut mengedepankan nilai-nilai perdamaian.

Apa itu perdamaian? Apakah hanya karena tidak adanya perang? Apabila perdamaian yang dimaksudkan tidak lebih dari sebuah gencatan senjata, apabila perdamaian tidak lebih dari kelanjutan perang melalui cara-cara politik, apabila perdamaian tidak lebih dari keberhasilan penaklukan satu pihak oleh pihak lain, atau jika perdamaian hanya bersifat lokal, maka tidak ada kedamaian sejati di dalamnya. Perdamaian sejati, menurut Immanuel Kant membutuhkan aturan hukum yang adil di dalam negara (Kleingeld, 2006). Aturan itu tidak membelenggu atau membuat komponen tertentu berada dalam penindasan.

Benturan atau konflik memang sering dianggap sebagai sesuatu yang negatif, merugikan dan mengganggu kestabilan, walaupun di sisi lain dipercaya memiliki daya positif sebagai sebuah proses menuju perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga oleh karena itu, konflik harus diakui keberadaannya, diolah, dikelola, dan diubah menjadi kekuatan yang berguna bagi masyarakat. konflik dikelola demi mewujudkan masyarakat yang damai. Menurut Uri Savir perdamaian hanya bisa dicapai melalui kerja sama dan sikap antar masyarakat negara-negara konflik. Savir melihat hubungan antara manusia dipengaruhi oleh budaya, institusi sosial dan proses politik (Indrawan, 2021). Karena itu, Kekuatan utama dalam menciptakan perdamaian bukan pada pemerintah pusat saja, tetapi juga pada pemerintah daerah, dan terlebih lagi keterlibatan masyarakat sipil dalam proses mewujudkan perdamaian.

Dalam konteks percaturan politik pada ruang publik di Indonesia, konsep politik damai melekat erat pada sosok pluralis dan humanis Abdurrahman Wahid (selanjutnya ditulis Gus Dur). Memang, cetusan filosofis dari para filsuf barat banyak menggeluti hal itu, namun konsep politik damai Gus Dur lebih membumi, aktual, dan kontekstual mengingat realitas bangsa Indonesia dengan pluralitasnya.

Dalam pemikiran dan tindakannya, Gus Dur mengusung prinsip politik damai yang mengedepankan kesetaraan dan pembebasan (Fuada, 2022).

Dialog, partisipasi, dan makna kepapuaan dalam bingkai keindonesiaan hanya dapat dijalankan di atas konstruksi berpikir kesetaraan dan perasaan sebagai orang yang merdeka, bukan tertindas. Gus Dur telah lama membentangkan ide itu. Dinamika, mekanisme, dan kebijakan politik terhadap masyarakat Papua perlu dilandasi pilar berpikir *ala* Gus Dur. Oleh karena itu, elaborasi ini akan ditelusuri dalam beberapa pertanyaan: apa pemicu konflik di Papua? Seperti apa politik damai yang dicetuskan Gus Dur? Bagaimana cetusan Gus Dur diimplementasikan dalam konteks konflik KKB-TNI di Papua?

Metode

Metodologi diskursus yang digunakan dalam artikel ini mencakup pendekatan analisis teks dan konteks untuk menggali pemahaman mendalam tentang bagaimana politik damai dapat diusung dalam konteks konflik antara KKB dan TNI di Papua, dengan mengambil perspektif Gus Dur.

Analisis teks dalam memfokuskan pada dokumen-dokumen penting, seperti pidato, tulisan, dan wawancara Gus Dur terkait Papua dan politik damai. Ini akan memungkinkan pemahaman tentang nilai, tujuan, dan strategi politik damai menurut perspektifnya. Selanjutnya, analisis konteks mempertimbangkan kondisi sosial, politik, dan ekonomi di Papua serta dinamika konflik antara KKB dan TNI. Hal ini akan membantu menghubungkan pandangan Gus Dur dengan realitas lapangan dan memahami tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan politik damai.

Selain itu, dalam artikel ini menggunakan berbagai literatur yang juga membahas konflik Papua dan apa pandangan Gus Dur dalam mengatasi konflik tersebut. Dari metode ini, dapat dihasilkan gambaran komprehensif tentang bagaimana politik damai dapat diterapkan dalam konteks konflik Papua berdasarkan perspektif Gus Dur, sambil mempertimbangkan kompleksitas situasi di lapangan.

Pembahasan

Konflik di Papua dipicu oleh ragam persoalan yang memantik semangat untuk menyerukan kemerdekaan atau pelepasan diri dari NKRI. Persoalan-persoalan yang mengitari kehidupan penduduk Papua pada satu sisi diteropong sebagai kekuatan untuk membangun Papua tanpa peran NKRI. Apakah diskursus pelepasan itu menjadi solusi yang tepat untuk mewujudkan kemajuan Papua, tentu saja tidak memberikan jawaban yang pasti. Justru sebaliknya, pada sisi yang lain, beragam persoalan yang terjadi di Papua bisa dilihat juga sebagai kekuatan komunal masyarakat suku Papua asli untuk bergerak maju dalam bingkai NKRI. Geliat dan pergerakan maju tak akan terwujud apabila masyarakat Papua terjajah oleh

perasaan sebagai suku bangsa yang tertindas, terbelakang, tanpa pembebasan, dan terdepak dari kedudukan yang setara dengan suku bangsa lain di NKRI. Perasaan sebagai suku bangsa yang setara dan merdeka perlu diinternalisasikan ke dalam diri melalui pelbagai kebijakan dan konstruksi berpikir politik damai.

Melacak Akar Pemicu Konflik di Papua

Pembangunan Papua sangat gencar dilakukan dalam masa Presiden Jokowi. Pembangunan jalan trans Papua, stadion Papua Bangkit/Lukas Enembe, dan pembangunan infrastruktur lainnya, beserta penerapan pemerataan harga BBM merupakan sebagian contoh saja. Demikian pula pada masa pemerintahan presiden-presiden sebelumnya, telah ada upaya untuk menggenjot kemajuan Papua. Akan tetapi, konflik di Papua belum meredam juga, dan kalau begitu, pembangunan Papua bukanlah tolok ukur sekaligus solusi paling komprehensif untuk membendung eskalasi konflik. Kalau halnya bukan semata-mata menyangkut pembangunan yang tertinggal, maka bernalar tentang alasan fundamental dari konflik itu adalah keniscayaan.

Neles Tebay menandakan bahwa suatu kesalahan besar apabila masalah Papua direduksi menjadi sekedar masalah ekonomi dan pembangunan. Ia mengungkapkan, konflik Papua bukanlah konflik horizontal antara warga sipil. Bukan pula konflik antarsuku-suku asli Papua, antar anggota Gereja yang berbeda atau pemeluk agama yang berbeda, antara orang asli Papua dan komunitas-komunitas non-Papua. Menurutnya, konflik Papua dari kodratnya adalah konflik vertikal, yakni konflik antara pemerintah Indonesia yang berpusat di Jakarta dan orang Papua yang bergabung dalam OPM dengan berbasis di Tanah Papua (Tebay, 2016). Dengan kata lain, konflik ini terjadi antara pemerintah Indonesia yang mempertahankan Papua sebagai bagian dari negara Indonesia dan OPM yang berjuang memisahkan Papua dari Indonesia guna membentuk negara Papua Barat. Maka, konflik ini, dari dirinya, merupakan konflik politik.

Mengapa konflik vertikal itu dapat terjadi, Richard Chauvel, memetakan empat persoalan dasar yang dapat diidentifikasi, yakni; pertama, kekecewaan karena tanah Papua menjadi bagian dari Indonesia, kedua adanya persaingan yang dirasakan elit tanah Papua dengan pejabat asal luar tanah Papua yang mendominasi pemerintahan sejak kolonial Belanda, ketiga, pembangunan ekonomi dan pemerintahan di tanah Papua yang berbeda, dan keempat, marjinalisasi orang asli Papua karena kehadiran pendatang. Pandangan-pandangan tersebut menjadi legitimasi bagi kelompok-kelompok yang tidak puas sehingga melahirkan kelompok-kelompok pro-kemerdekaan Papua (Chauvel, 2005).

Afirmasi ini bukan tanpa alasan. Dari sendirinya kita melihat bahwa orang asli Papua telah memosisikan diri sebagai suku bangsa yang tertindas, yakni yang terdepak di tanah leluhurnya sendiri, mereka yang ditinggalkan dari pembangunan bidang ekonomi, mereka yang tidak secara utuh dilibatkan dalam percaturan pembangunan maupun kebijakan di tanahnya sendiri, dan teristimewa mereka yang terkungkung dalam keterbelakangan nyaris pada seluruh sisi kehidupan

negara tercinta, Indonesia. Kalau halnya demikian, maka mereka dibingkai oleh perangai dan perasaan sebagai suku bangsa yang tertindas. Tidak setara dengan suku bangsa lain di NKRI. Maka wajar-wajar saja ketika mereka berkehendak untuk melepaskan diri.

Memang tidak semua orang asli Papua mengalami perasaan ataupun diperlakukan secara demikian. Namun, halnya bukan soal kuantitas dari orang Papua yang merasa tertindas, melainkan substansinya, yakni alasan dari perasaan itu akan terus menggerogoti dan memantik semangat perjuangan mereka, dan lambat laun memengaruhi individu yang lain. Orang Papua asli yang dimaksudkan adalah mereka yang berada di garis pinggir dalam tiap-tiap kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Indonesia. Kelompok orang asli Papua itu, terutama dimaksudkan mereka yang bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mereka menetap di kampung-kampung, dan merekalah yang paling merasakan dampak secara langsung dari semua jenis konflik yang terjadi di tanah leluhurnya. Mereka biasa dicurigai sebagai separatis dan karena itu diperlakukan sebagai musuh negara oleh pemerintah terutama oleh aparat keamanan. Mereka hidup dengan kenangan pahit dan luka di batinnya (Tebay, 2016).

Konflik Papua telah menyebabkan mereka hidup dengan memori yang terluka (*wounded memory*). Kenangan pahit semacam ini pada akhirnya memengaruhi pola persepsi mereka terhadap eksistensi suku mereka sendiri, pemerintah, para pendatang, dan berbagai peristiwa sosial dan politik yang terjadi di Tanah Papua. Parahnya, mereka biasanya tidak diajak dan dilibatkan dalam proses membuat kebijakan yang akan mempunyai dampak langsung terhadap hidup dan masa depannya. Mereka tidak dihargai sebagai manusia, karena itu tidak diikutsertakan dalam membahas isi kebijakan tentang Papua (Tebay, 2016). Jika halnya demikian, maka apapun upaya yang ditetapkan oleh pemerintah dalam membendung konflik di Papua tidak serta merta menyelesaikan konflik, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

Dengan berdasar pada eskalasi konflik maupun upaya perundingan dari waktu ke waktu, para peneliti LIPI mengibaratkan berbagai konflik antara Papua dan Jakarta sebagai "pertandingan" karena seperti itulah perasaan orang Papua terhadap Jakarta: Jakarta merupakan lawan. Pada "pertandingan" New York Agreement 1962, pemimpin Papua tidak dilibatkan. Pada "pertandingan" Penentuan Pendapat Rakyat 1969, rakyat Papua merasa dicurangi. Selanjutnya, pada pertandingan 1977 yang dikenal sebagai Gejolak Sosial dan kemudian diikuti oleh pelaksanaan berbagai operasi militer di Papua, rakyat Papua merasa dikorbankan dalam rangkaian panjang kekerasan politik yang hari ini disebut sebagai pelanggaran HAM. Demikian pula, dalam "pertandingan" ekonomi, rakyat Papua merasa dimiskinkan dengan eksploitasi dan ekstraksi sumber daya alam secara sepihak. Dalam "pertandingan" Otsus rakyat Papua merasa dipecah belah dengan munculnya Pemekaran Irian Jaya Barat 2003 dan rekayasa pemilihan anggota MRP 2005 (Elisabeth et al., 2005).

Kondisi semacam ini, pada gilirannya telah membuat orang Papua benar-benar

"patah arang" dengan Jakarta. Secara kolektif tumbuh perasaan dimarjinalkan, putus asa, sinis, marah, serta sama sekali tidak percaya kepada Jakarta. Lebih parah lagi, Indonesia di mata orang Papua adalah representasi ketidakdamaian, kekerasan, ketidakadilan, dan hilangnya harapan. Pengembalian Otsus kepada Pemerintah Indonesia pada 12 Agustus 2005 adalah salah satu representasi perasaan kolektif itu. Dalam suasana hati dan pikiran kolektif demikian, kita dapat mengerti bahwa kata "merdeka" menjadi kata kunci dalam wacana politik dan budaya Papua kontemporer (Elisabeth et al., 2005). Wacana inilah yang membuat konflik itu tak akan berakhir.

Perasaan tertindas di tanah sendiri begitu melekat di dalam diri penduduk Papua, dan kemudian diskursus pelepasan diri dari NKRI mencuat bukan sekedar wacana saja, istimewanya bila dikaitkan pula dengan sejarah pengintegrasian Papua ke dalam NKRI yang dianggap bermasalah oleh beberapa pihak. Apabila menyelisik sejarah, pemicu konflik di Papua mengapung ke permukaan sejak terbentuknya NKRI pada tahun 1945. Jadi halnya bukan saja menyangkut perasaan tertindas atau dianak-tirikan, tapi juga menyangkut sejarah pengintegrasian itu sendiri. Pada pertemuan di Saigon, Vietnam, tanggal 12 Agustus 1945 dengan Jenderal Hasaichi Taraci, pengintegrasian Papua sebagai bagian dari NKRI bagi Soekarno tidak perlu dikaitkan dengan kemerdekaan RI mengingat kondisi masyarakat Papua yang masih primitif pada saat itu. Malahan Mohamad Hatta menegaskan bahwa bangsa Papua adalah ras negroid dan berbeda dengan orang Indonesia pada umumnya (Anugerah, 2019). Implikasinya, mereka bebas menentukan nasibnya sendiri. Perbedaan latar belakang ras dan budaya yang begitu kentara pada gilirannya meneguhkan perasaan dan kehendak orang Papua yang hendak memisahkan diri bahwa mereka bukanlah bagian dari NKRI. Inilah hilir konflik berkepanjangan di Papua.

Konsep Politik Damai Gus Dur

Kita telah berupaya memetakan hilir konflik Papua, yang dari sendirinya dapat disimpulkan sebagai konflik politik. Di sini, cetusan konflik politik bukan pertama-tama bermaksud merunut atau mencari solusi yang terejahwantah dalam bentuk kebijakan-kebijakan politik praktis. Kita hanya ingin menggumuli elemen fundamental dari konflik itu, dan sekaligus mengusung konstruksi berpikir fundamental bagaimana konstelasi politik yang perlu dibangun dalam konteks situasi demikian.

Dalam negara modern, persoalan bertambah kompleks seiring dengan pluralitas agama, ideologi, dan pandangan politik. Karena itu konsep tentang keadilan, *fairness*, legitimasi dan kesejahteraan selalu harus dihubungkan dengan persoalan-persoalan sosial konkret. Juga harus ditempatkan dalam konteks pemahaman diri individu-individu atau kelompok-kelompok sosial yang berkepentingan (Madung, 2013). Itulah mengapa dalam elaborasi ini, kita menggumuli konstruksi berpikir Gus Dur yang sangat relevan dan kontekstual. Gus Dur tidak secara gamblang merumuskan konsep politik damai. Karena itu, kita

hanya berkenalan dengan percikan pikirannya yang terbersit di dalamnya mengenai politik damai itu.

Gagasan-Gagasan dasar Gus Dur tidak bisa terlepas dari status keulamaan yang turut memengaruhi skematika pemikiran politiknya (Soim, 2018). Harus Diakui, Gus Dur adalah ulama besar yang sangat pluralis, maka sangatlah layak bila ia disematkan sebagai pahlawan pluralisme Indonesia. Dialah yang secara nyata dapat kita lihat telah mempresentasikan Islam sebagai rahmat bagi semesta. Ia pahlawan pluralis bukan terutama pada kata dan gagasannya, namun lebih jauh pada tindakan konkret yang nyata dalam testimoni hidupnya. Gus Dur adalah sosok yang membebaskan orang-orang Tionghoa Indonesia ataupun kelompok minoritas lainnya seperti Ahmadiyah keluar dari kungkungan penindasan. Gus Dur adalah orang pertama yang melepaskan masyarakat Tionghoa dari belenggu Orde Baru, sehingga dia dipuja sebagai pahlawan yang layak mendapatkan nobel perdamaian. Gus Dur dinilai telah menyebarkan benih-benih perdamaian, pluralisme dan multikulturalisme tidak hanya bagi rakyat Indonesia, tetapi juga bagi organisasinya, NU (Mustajab, 2014).

Pengaruh latar belakang hidupnya yang lebih dekat dengan rasionalitas melahirkan corak gagasan yang liberal dan inklusif, sehingga dari sendirinya Gus Dur mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam realitas kehidupan. Dalam konstelasi politik di Indonesia kita menemukan beberapa pilar pemikiran Gus Dur yang benar-benar memosisikan manusia kembali kepada natura kemanusiaannya. Ahmad Rifki Fuada menandakan sembilan pilar utama pemikiran Gus Dur, yakni ketauhidan, kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, pembebasan, kesederhanaan, persaudaraan, kekesatriaan, dan kearifan tradisi (Fuada, 2022). Penulis hanya beraksentuasi pada pilar pemikiran yang berhubungan langsung dengan elaborasi ini.

Dengan ketauhidan, halnya memaksudkan bahwa Allah SWT sebagai yang maha ada, satu-satunya Dzat hakiki yang Maha Cinta Kasih, yang disebut dengan berbagai nama. Ketauhidan yang bersifat Ilahi itu diwujudkan dalam perilaku dan perjuangan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Kemanusiaan merupakan cerminan sifat-sifat Tuhan. Kemuliaan yang ada dalam diri manusia mengharuskan sikap untuk saling menghargai dan menghormati. Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Demikian merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan Tuhan Sang Pencipta. Komitmen kemanusiaan itu pada intinya adalah menghargai sikap toleransi dan memiliki kepedulian yang kuat terhadap keharmonisan sosial (*sosial harmony*) (Soim, 2018).

Konsep kemanusiaan itu, pada gilirannya termanifestasi dalam tindakan nyata yang memanusiakan manusia, dalam prinsip keadilan, kesetaraan, dan pembebasan. Keadilan bersumber dari pandangan bahwa martabat kemanusiaan hanya bisa dipenuhi dengan adanya keseimbangan, kelayakan, dan kepatutan dalam kehidupan masyarakat. Perlindungan dan pembelaan pada kelompok masyarakat yang di perlakukan tidak adil, merupakan tanggung jawab moral

kemanusiaan.

Kesetaraan mengandaikan adanya perlakuan yang adil, hubungan sederajat, ketiadaan diskriminasi dan subordinasi, serta marjinalisasi dalam masyarakat. Dengan demikian, tidak ada satu komponen masyarakat pun yang terbelenggu oleh perasaan tertindas. Semangat pembebasan hanya dimiliki oleh jiwa yang merdeka, bebas dari rasa takut, dan otentik. Dengan nilai pembebasan ini, Gus Dur selalu mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya jiwa-jiwa merdeka yang mampu membebaskan dirinya dari manusia lain. Mereka yang merasa merdeka, bebas, dan lepas dari perasaan tertinggal mampu membentuk persekutuan hidup dalam bingkai persaudaraan.

Indonesia telah memiliki patokan dan kekuatan fundamental untuk mengimplementasikan pilar-pilar tersebut sebagai hakikat eksistensial manusia Indonesia. Patokan yang dimaksudkan adalah Pancasila sistem demokrasi. Dalam konteks pemikiran Gus Dur, pancasila sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara harus menjadi kerangka kemasyarakatan kita sebagai bangsa. Pancasila juga harus mewadahi aspirasi agama-agama yang menumpang kedudukannya secara fungsional. Dalam Pancasila, hakikat eksistensial manusia ditempatkan dalam posisinya yang menyokong persaudaraan, pembebasan, kesetaraan, dan keadilan. Juga tidak ada pertentangan antara Pancasila dan Agama. Itulah yang diperjuangkan Gus Dur selama hidupnya terutama ketika ia menjabat sebagai presiden Indonesia. Ia keluar dari sistem Orde Baru yang membunuh demokrasi dan pilar-pilar tadi.

Era Orde Baru merupakan era yang menunjukkan pemerintahan yang sangat kaku, keras, serta harus tunduk terhadap aturan-aturan dan larangannya yang dibuat pemerintahan Orde Baru, dan tidak ada kebebasan mengekspresikan sesuatu, bahkan kritik terhadap pemerintahan Orde Baru pun dilarang, apalagi membuat pernyataan melalui sebuah dagelan untuk melawan pemerintahan Orde Baru sangat dilarang karena dianggap melawan. Sehingga siapapun yang melawan pemerintahan Orde Baru akan dicari, ditangkap, dan dimasukkan ke dalam penjara (Hidayatulloh, 2018). Gus Dur berupaya membebaskan Indonesia dari hal itu dan lantas kembali menegakan demokrasi.

Dengan sistem demokrasi yang dianut Indonesia, Gus Dur menandakan bahwa harus ada tiga nilai yang ada pada sistem itu, yang kerap dilenyapkan oleh Orba. Ketiga nilai itu antara lain kebebasan, keadilan, dan musyawarah (Setiawan, 2017). Yang dimaksud kebebasan di sini adalah kebebasan individu di hadapan kekuasaan negara dan masyarakat. Keadilan merupakan landasan demokrasi dalam arti terbukanya peluang kepada setiap lapisan masyarakat untuk membangun kehidupan sesuai dengan keinginannya. Keadilan penting dalam arti seseorang memiliki hak untuk menentukan jalan hidupnya. Keadilan merupakan landasan demokrasi, dalam arti terbuka peluang bagi semua komponen masyarakat untuk mengatur hidupnya sesuai kehendak masing-masing. Oleh karena setiap orang punya hak dan kesempatan untuk mengatur hidup dan kehidupannya sehingga harus diberi jalan yang mudah dan tidak dipersulit, seperti beberapa kasus yang

terjadi pada saat Orde Baru (Muh. Rusli, 2015). Pada akhirnya, Musyawarah yaitu bentuk atau cara memelihara kebebasan dan memperjuangkan keadilan lewat permusyawaratan.

Bagi Gus Dur nilai pokok demokrasi memiliki kesamaan dengan misi agama. Pada dasarnya agama bertujuan menegakan keadilan bagi kesejahteraan rakyat. Karena itu demokrasi harus sejalan dengan ajaran agama dalam membangun kehidupan masyarakat yang adil dan beradab. Gus Dur tidak membenarkan adanya demokrasi yang bertentangan dengan ajaran agama.

Implementasi Politik Damai Gus Dur dalam Mengatasi Eskalasi Konflik KKB-TNI

Konflik di Papua yang digelontorkan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata dari sendirinya merupakan konflik politik yang menuntut pembebasan, kemerdekaan, kesetaraan manusia Papua secara khusus dengan manusia Indonesia pada umumnya. KKB yang telah ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh pemerintah NKRI, mati-matian menghendaki manusia asli Papua yang terlepas dari kungkungan penindasan. Gerakan pembebasan itu berujung pada kehendak untuk terlepas secara utuh dari NKRI.

Namun demikian, pemerintah Indonesia tentu saja tidak menutup mata terhadap gerakan-gerakan separatis apa pun. Akan tetapi upaya pemerintah Indonesia untuk memberangus kelompok separatis tidak bisa terus menerus bergerak dalam skema pengerahan aparat keamanan seperti TNI-POLRI, dialog, pembangunan Papua yang gencar, ataupun juga perluasan secara paripurna otonomi khusus Papua. Pemerintah Indonesia perlu melihat kembali bagaimana sistem demokrasi telah diterapkan khususnya dalam konteks suku bangsa Papua. Maksudnya, apakah Indonesia telah benar-benar demokratis dalam memperlakukan kebijakan terhadap Papua?

Gus Dur pernah mengkritik Orde Baru yang mengukur demokratisasi hanya dari segi kelembagaannya saja. Dalam konteks kebangsaan Indonesia, Gus Dur memandang demokrasi sebagai suatu proses atau budaya yang terus menerus. Ketika ada komponen anak bangsa yang terkungkung oleh perasaan tertindas maka demokrasi belum sepenuhnya dijalankan. Gus Dur sangat gusar dan tak pernah tenang melihat nilai luhur demokrasi terinjak-injak. Menurut Gus Dur dalam masyarakat demokratis; 1) semua warga negara kedudukannya sama di muka hukum, 2), yang berperan adalah kedaulatan hukum bukan kedaulatan kekuasaan, 3), kebebasan berpendapat dibuka seluas-luasnya, dan 4), adanya pemisahan yang tegas dalam fungsi yang tidak boleh saling mempengaruhi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Muh. Rusli, 2015).

Disebutkan pula sebuah negara yang demokratis adalah yang mampu menjamin hak-hak dasar manusia, yang meliputi:1). jaminan keselamatan fisik; 2). jaminan keselamatan keyakinan agama; 3). jaminan kehidupan keutuhan rumah tangga; 4). jaminan keselamatan hak milik; dan 5). jaminan keselamatan akal. Nilai demokratisasi menurut Gus Dur perlu dilakukan secara kontinyu, sebab tanpa itu mustahil demokrasi akan berjalan. Cara-cara pensosialisasiannya menurut Gus Dur

adalah sebagai berikut: Pertama, diupayakan untuk menerapkan kepada rakyat, kepada masyarakat umum tentang pentingnya nilai-nilai dasar demokrasi untuk kepentingan mereka. Ini merupakan pendekatan normatif. Kedua, pendekatan empirik, pendekatan yang sifatnya membangun kesadaran tentang nilai-nilai demokrasi dari praktek pengalaman (Muh. Rusli, 2015).

Kritik Gus Dur atas implementasi demokrasi sebagaimana diuraikan sebelumnya tampaknya terbingkai dalam pilar-pilar pemikirannya. Di atas semua gambaran ideal tentang demokrasi, Gus Dur memprakarsai gagasan-gagasan yang memosisikan manusia dengan berakar pada kodrat kemanusiaannya. Intisari pilar-pilar pemikiran Gus Dur, seperti ketauhidan, kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, pembebasan, kesederhanaan, persaudaraan, kekesatriaan, dan kearifan tradisi, harusnya bukan berkanjang pada tataran nalar saja, tapi mengejawantah pada realitas hidup keseharian bangsa Indonesia. Cetusan-cetusan tersebut berkontribusi positif pada pembentukan hidup berbangsa yang selama ini tidak dapat terhindar dari berbagai sengkabut konflik.

Dalam konteks eskalasi konflik di Papua, pilar pemikiran Gus Dur adalah oase penyembuh atas kesemerawutan yang ada. Konsep ketauhidannya merevitalisasi kesadaran bersama bangsa Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Yang Esa. Bahwa dengan beriman kepada Allah yang Esa, bangsa Indonesia menjunjung tinggi keberpihakan pada nilai-nilai kemanusiaan yang bersumber dari Tuhan Yang Esa itu. Implementasinya tampak misalnya dalam dialog antara pemerintah dan kelompok separatis yang mengedepankan semangat keadilan, kesetaraan, dan toleransi. Pemahaman bahwa semua agama mengajarkan nilai-nilai kedamaian dan keadilan dapat dijadikan dasar untuk membentuk solidaritas antar sesama anak bangsa. Di sini menjadi jelas betapa pentingnya mempromosikan implementasi dari pendidikan agama yang inklusif, yang menghormati dan memahami keberagaman, yang penerapannya terwujud dalam kurikulum pendidikan.

Implementasi konsep ketauhidan tidak bisa berjala sendiri, tapi harus terus menerus didukung oleh pilar kemanusiaan, sebab upaya mengatasi konflik yang hanya beraksentuasi pada upaya peperangan seringkali menimbulkan korban yang tidak sedikit, baik dari pihak pemerintah maupun kelompok separatis. Upaya pengerahan aparat keamanan pada kenyataannya memberangus manusia dari kemanusiaannya. Hal itu jauh dari apa yang dicita-citakan oleh Gus Dur. Gus Dur menggarisbawahi adanya kemuliaan yang ada dalam diri manusia sebagai percikan dari kemuliaan ilahi. Dengan demikian, Gus Dur jelas-jelas mengusung konsep kemanusiaan yang memuliakan manusia Papua. Alih-alih untuk memuliakan manusia Papua, pembangunan besar-besaran serta Otsus yang sudah ada selama ini, justru hanya dinikmati segelintir elit di Papua. Rakyat di akar rumput, di kampung-kampung, dan di pedalaman tetap saja terkungkung dalam aneka keterbelakangan. Jika tidak segera diatasi dengan upaya pembangunan yang memuliakan manusia, situasi Papua hari ini terus menjadi-jadi di masa yang mendatang.

Karena itu, menimba inspirasi dari Gus Dur, pemberdayaan masyarakat lokal di Papua adalah upaya yang mendesak untuk memanusiakan masyarakat Papua. Masyarakat lokal perlu berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan lokal untuk menciptakan ikatan yang lebih kuat sekaligus mengurangi potensi konflik. Di sana ada implementasi nilai-nilai demokrasi, sebab pengambilan keputusan bukan hanya milik pemerintah di Jakarta ataupun elit Papua, tapi juga rakyat Papua kebanyakan yang terepresentasi oleh perwakilan-perwakilan masyarakat seperti tokoh adat maupun tokoh agama.

Pemberdayaan lainnya melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan ekonomi lokal dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Identitas kebudayaan lokal Papua pun harus diberikan tempat seluas-luasnya dalam ruang publik dengan semangat inklusivitas. Maksudnya adalah memungkinkan masyarakat Papua merasa diakui dalam identitas dan budayanya dan mengurangi perasaan ketidakpuasan dan alienasi dari bangsa Indonesia yang holistik.

Masyarakat Papua memiliki kandungan yang sangat berarti dalam keanekaragaman budaya, tradisi, dan sistem nilai yang kaya, yang ada di sana. Itu semua tidak boleh dipinggirkan atau diabaikan begitu saja dalam mengatasi dinamika konflik. Kearifan lokal masyarakat Papua perlu dimanfaatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan dan pembangunan wilayah mereka. Maka, institusi adat perlu dilibatkan. Pilar kemanusiaan Gus Dur dari sendirinya tersentuh di ranah yang bercorak demikian. Menghormati dan melindungi hak asasi manusia adalah nilai inti dalam konsep kemanusiaan Gus Dur. Dengan begitu, pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa hak-hak asasi manusia Papua, termasuk kebebasan berpendapat dan berkumpul, dihormati dan dijalankan di sana. Halnya melibatkan penegakan hukum yang adil dan penanganan konflik tanpa melibatkan pelanggaran hak asasi manusia (Tebay, 2016).

Konflik di Papua salah satunya ditengarai oleh perasaan Bangsa Papua yang memiliki memori terluka terhadap Indonesia (Suropati, 2019). Memori terluka itu akan memicu konflik apabila ada perlakuan yang tidak adil dari pihak pemerintah yang di Jakarta maupun pemerintah di Papua terhadap masyarakat Papua sendiri. Konflik juga terjadi apabila masyarakat Papua merasa diperlakukan secara tidak adil. Gus Dur mencanangkan perlakuan yang adil, hubungan sederajat, ketiadaan diskriminasi dan subordinasi, serta marginalisasi dalam masyarakat. Hal itu hanya menjadi mungkin apabila pemberdayaan benar-benar diperlakukan secara menyeluruh di Papua, di segala segi bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kebudayaan. Akses pendidikan dan kesehatan seperti sekolah-sekolah dan rumah sakit yang layak tidak hanya terbatas di kota-kota saja, tapi juga di pedesaan tempat domisili masyarakat Papua kebanyakan. Satu desa satu nakes satu faskes perlu dipertimbangkan.

Upaya-upaya itu digaungkan untuk membangun rasa persaudaraan yang tinggi antar sesama anak bangsa. Gus Dur Mencetuskan bahwa tanpa ada rasa persaudaraan, dialog dan pembangunan masih sebatas instrumen kelembagaan

saja (Aqil, 2020). Akhirnya ia hanya menjadi upaya yang sia-sia dalam mengatasi konflik. Harus diakui, segala upaya untuk mengimplemntasikan nilai-nilai itu, bukan proses yang mudah. Gus Dur menggarisbawahi adanya upaya yang harus dilakukan terus menerus dalam perjalanan kehidupan berbangsa. Dalam konteks ini, sikap kesatria sebagai putra-putri bangsa Indonesia atau putra-putri Papua adalah hal yang patut disadari. Kekesatriaan menurut Gus Dur, yang mencakup keberanian, integritas, tanggung jawab, komitmen, kesabaran, dan keikhlasan, dapat diimplementasikan secara efektif untuk mengatasi eskalasi konflik di Papua.

Kesimpulan

Orang asli Papua telah memosisikan diri sebagai suku bangsa yang tertindas, yakni yang terdepak di tanah leluhurnya sendiri, mereka yang ditinggalkan dari pembangunan bidang ekonomi, mereka yang tidak secara utuh dilibatkan dalam percaturan pembangunan maupun kebijakan di tanahnya sendiri, dan istimewa mereka yang terkungkung dalam keterbelakangan nyaris pada seluruh sisi kehidupan negara tercinta, Indonesia. Kalau halnya demikian, maka mereka dibingkai oleh perangai dan perasaan sebagai suku bangsa yang tertindas. Tidak setara dengan suku bangsa lain di NKRI. Memang tidak semua orang asli Papua mengalami perasaan ataupun diperlakukan secara demikian. Namun halnya bukan soal kuantitas dari orang Papua yang merasa tertindas, melainkan isi, yakni alasan dari perasaan itu akan terus menggerogoti dan memantik semangat perjuangan mereka, dan lambat laun memengaruhi individu yang lain.

Beragam persoalan yang terjadi di Papua bisa dilihat juga sebagai kekuatan komunal masyarakat suku Papua asli untuk bergerak maju dalam bingkai NKRI. Geliat dan pergerakan maju tak akan terwujud apabila masyarakat Papua terjajah oleh perasaan sebagai suku bangsa yang tertindas, terbelakang, tanpa pembebasan, dan terdepak dari kedudukan yang setara dengan suku bangsa lain di NKRI. Perasaan sebagai suku bangsa yang setara dan merdeka perlu diinternalisasikan ke dalam diri melalui pelbagai kebijakan dan konstruksi berpikir politik damai Gus Dur yang mengusung kesetaraan dan kesamaderajatan sebagai putra-putri dari bumi pertiwi Indonesia.

Kontribusi Penulis

Yetva Softiming Letsoin: *Konseptualisasi, Metodologi, Menulis Naskah, Analisis.*

Oktovianus Robertus Baunsele: *Konseptualisasi, Menulis Naskah, Analisis.*

Tomy Taroreh: *Menulis Naskah, Analisis.*

Sponsor

Penelitian ini didukung oleh Rumah Formasi Seminari Tinggi SVD Surya Wacana Malang-Jawa Timur.

Pernyataan Keaslian

Artikel ini adalah karya asli penulis yang telah bebas dari plagiarisme. Artikel ini juga merupakan sebuah karya yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya dan tidak sedang dikirim ke jurnal lain.

Biografi

Yetva Softiming Letsoin adalah mahasiswa Semester satu pada program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang. Beberapa karya kolaboratif yang pernah dipublikasikan adalah *Homo Digitalis dan Kebenaran: Studi tentang Relevansi Konsep Kebenaran dari Sudut Pandang Paul Ricoeur* (2021), *Radikalisme Timur-Tengah dan Pengaruhnya di Indonesia* (2021) *Gereja Partisipatif-Memasyarakat di Tengah Pandemi Covid-19* (2021), *Hauteas: Disingkirkan atau Dilestarikan?* (2022), dan masih beberapa karya tulis lain. Penulis juga pernah menulis opini di *Harian Jawa Pos*.

Oktovianus Robertus Baunsele adalah mahasiswa pada program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang. Karya yang pernah dipublikasikan adalah *Hauteas: Disingkirkan atau Dilestarikan?* (2022).

Tomy Taroreh adalah mahasiswa pada program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang. Beberapa karya yang pernah dipublikasikan yaitu *Mutiara-mutiara terpendam: Kumpulan Narasi Kebudayaan dengan judul "war in love action"* Malang: Widya Sanana Publication (2018), menulis di buku *Mutiara-mutiara terpendam: Kumpulan Narasi Kebudayaan dengan judul "war in love action"* Malang: Widya Sanana Publication (2018), menulis di buku *Jejak Langkah dengan judul "Long Bumbung"* Malang: Widya Sanana Publication (2019). menulis di *Buku Spritualitas Keluarga Arnoldus Janssen dengan judul "Peran Roh Kudus dalam Karya Pelayanan: Menimba semangat Misi Mgr. Anton Pain Ratu"*. Malang: Widya Sanana Publication (2020) dan lainnya.

Referensi

- Anugerah, B. (2019). Papua: Mengurai Konflik dan Merumuskan Solusi. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 23, 51–65.
- Aqil, M. (2020). Nilai-Nilai Humanisme dalam Dialog antar Agama Perspektif Gus

- Dur. Al-Adyan, 1(1), 52–66.
- Chauvel, R. (2005). *Constructing Papua Nationalism: History, Ethnicity, and Adaptation*. East-West Center.
- Elisabeth, A., Pamungkas, C., Widjojo, M. S., Rucianawati, & Blegur, S. (2005). *Agenda dan Potensi Damai di Papua*. LIPI Press.
- Fuada, A. R. (2022). *Konsep Pendidikan Perdamaian KH Abdurrahman Wahid dalam Perspektif Pendidikan Islam*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hidayatulloh, N. S. (2018). Dagelan Politik Gus Dur tahun 1999-2001. *Avatara*, 6(4).
- Indrawan, J. (2021). Mekanisme Resolusi Konflik di ASEAN: ASEAN Sebagai Fasilitator Konflik. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 17(2), 172–185. <https://doi.org/10.26593/jihi.v17i2.3830.172-185>
- Kaisupy, D. A., & Maing, S. G. (2021). Proses Negosiasi Konflik Papua: Dialog Jakarta-Papua. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(1), 82–98.
- Kleingeld, P. (Ed.). (2006). *Rethinking the Western Tradition*. Yale University Press.
- Madung, O. G. (2013). *Filsafat Politik: Negara Dalam Bentangan Diskursus Filosofis*. Ledalero.
- Muh. Rusli. (2015). Pemikiran Keagamaan dan Kebangsaan Gus Dur. *Farabi*, 12(1), 50–71.
- Mulyadi, Prakoso, L. Y., & I Wayan Mudhio. (2021). Konfrontansi Militer Pembebasan Papua Barat dalam Perspektif Strategi Perang Semesta. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 265–276.
- Mustajab, A. (2014). Kebijakan Politik Gus Dur terhadap China Tionghoa Di Indonesia. *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 4, No. 1, November 2014*, 4(1), 368. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/viewFile/1293/1121>
- Ramadhan, M. A. (2021). Analisis Dimensi Internasional Konflik Papua dalam Model Counterinsurgency (COIN). *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 17(1), 139–152. <https://doi.org/10.26593/jihi.v17i1.3532.139-152>
- Setiawan, E. (2017). Konsep Teologi Pluralisme Gus Dur Dalam Meretas Keberagaman Di Indonesia. *Asketik*, 1(1), 57–68. <https://doi.org/10.30762/ask.v1i1.411>
- Soim, M. (2018). *Analisis Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Partai Politik Islam di Indonesia (Nomor 132211050)*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Suropati, U. (2019). Solusi Komprehensif Menuju Papua Baru: Penyelesaian Konflik Papua secara Damai, Adil, dan Bermartabat. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 37(Jakarta), 73–89. <http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/52>
- Tebay, N. (2016). Transformasi Konflik Papua. *Jurnal Keagamaan dan Kebudayaan*, 12(2), 83–106.
- Anugerah, B. (2019). Papua: Mengurai Konflik dan Merumuskan Solusi. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 23, 51–65.
- Aqil, M. (2020). Nilai-Nilai Humanisme dalam Dialog antar Agama Perspektif Gus

- Dur. Al-Adyan, 1(1), 52–66.
- Chauvel, R. (2005). *Constructing Papua Nationalism: History, Ethnicity, and Adaptation*. East-West Center.
- Elisabeth, A., Pamungkas, C., Widjojo, M. S., Rucianawati, & Blegur, S. (2005). *Agenda dan Potensi Damai di Papua*. LIPI Press.
- Fuada, A. R. (2022). *Konsep Pendidikan Perdamaian KH Abdurrahman Wahid dalam Perspektif Pendidikan Islam*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hidayatulloh, N. S. (2018). Dagelan Politik Gus Dur tahun 1999-2001. *Avatara*, 6(4).
- Indrawan, J. (2021). Mekanisme Resolusi Konflik di ASEAN: ASEAN Sebagai Fasilitator Konflik. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 17(2), 172–185. <https://doi.org/10.26593/jihi.v17i2.3830.172-185>
- Kaisupy, D. A., & Maing, S. G. (2021). Proses Negosiasi Konflik Papua: Dialog Jakarta-Papua. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(1), 82–98.
- Kleingeld, P. (Ed.). (2006). *Rethinking the Western Tradition*. Yale University Press.
- Madung, O. G. (2013). *Filsafat Politik: Negara Dalam Bentangan Diskursus Filosofis*. Ledalero.
- Muh. Rusli. (2015). Pemikiran Keagamaan dan Kebangsaan Gus Dur. *Farabi*, 12(1), 50–71.
- Mulyadi, Prakoso, L. Y., & I Wayan Mudhio. (2021). Konfrontansi Militer Pembebasan Papua Barat dalam Perspektif Strategi Perang Semesta. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 265–276.
- Mustajab, A. (2014). Kebijakan Politik Gus Dur terhadap China Tionghoa Di Indonesia. *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 4, No. 1, November 2014*, 4(1), 368. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/viewFile/1293/1121>
- Ramdhan, M. A. (2021). Analisis Dimensi Internasional Konflik Papua dalam Model Counterinsurgency (COIN). *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 17(1), 139–152. <https://doi.org/10.26593/jihi.v17i1.3532.139-152>
- Setiawan, E. (2017). Konsep Teologi Pluralisme Gus Dur Dalam Meretas Keberagaman Di Indonesia. *Asketik*, 1(1), 57–68. <https://doi.org/10.30762/ask.v1i1.411>
- Soim, M. (2018). *Analisis Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Partai Politik Islam di Indonesia (Nomor 132211050)*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Suropati, U. (2019). Solusi Komprehensif Menuju Papua Baru: Penyelesaian Konflik Papua secara Damai, Adil, dan Bermartabat. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 37(Jakarta), 73–89. <http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/52>
- Tebay, N. (2016). Transformasi Konflik Papua. *Jurnal Keagamaan dan Kebudayaan*, 12(2), 83–106.